

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN ACEH SELATAN DALAM
MITIGASI BENCANA BANJIR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

FAKROL NIZAN

NIM : 200802039



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FAKROL NIZAN
NIM : 200802039
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Blang Baru, 24 November 2002
Alamat : Blang Krueng, Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, saya telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Agustus 2025

Yang menyatakan,



FAKROL NIZAN
NIM. 200802039

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN ACEH SELATAN DALAM
MITIGASI BENCANA BANJIR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

FAKROL NIZAN

NIM. 200802039

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Disetujui untuk munaqasyah kan oleh:

Pembimbing I


Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A.
NIP. 197309212000032004

Pembimbing II


Siti Nur Zalikha, M.Si.
NIP. 199002282018032001

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN ACEH SELATAN DALAM
MITIGASI BENCANA BANJIR**

SKRIPSI

FAKROL NIZAN

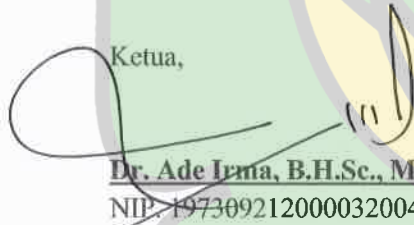
NIM. 200802039

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN AR-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : 26 Agustus 2025
2 Rabi'ul Awal 1447 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A.
NIP. 197309212000032004

Sekretaris,


Siti Nur Zakikha, M.Si.
NIP. 199002282018032001

Penguji I,


Dr. Said Amirul Kamar, M. M., M. Si.
NIP. 196110051982031007

Penguji II,


Zakki Fuad Khalil, M.Si.
NIP. 199011192022031001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN AR-Raniry Banda Aceh




Dr. Muji Mulla, S.Ag. M.Ag.
NIP. 1974032719990310005

ABSTRAK

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang kerap melanda wilayah Aceh, termasuk Kabupaten Aceh Selatan. Tanggung jawab penanggulangan bencana berada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sesuai amanat Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 38 Tahun 2016 yang mengatur struktur organisasi, tugas, fungsi, serta mekanisme kerja dari BPBD Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran BPBD dalam penanganan banjir serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa BPBD Aceh Selatan memiliki peranan penting sebagai koordinator utama dalam kerja sama lintas sektor bersama TNI, Polri, Pemerintah daerah, perangkat desa, relawan, organisasi Masyarakat, hingga warga terdampak. Peran tersebut mencakup berbagai kegiatan, mulai dari proses evakuasi korban, pemetaan daerah rawan banjir, distribusi bantuan, pembangunan dapur umum, hingga pembersihan lingkungan pasca-banjir. Interaksi sosial yang muncul ditandai dengan nilai gotong royong dan hubungan timbal balik, dimana partisipasi warga mempercepat langkah BPBD, sementara tindakan BPBD meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan Masyarakat. Kendala utama yang ditemukan antara lain keterbatasan sarana evakuasi, kurang meratanya sosialisasi, serta kesulitan dalam penanganan di malam hari. Sebaliknya, dukungan berupa solidaritas Masyarakat, kecepatan respons BPBD, serta bantuan lintas instansi menjadi faktor penguat dalam mitigasi banjir. Secara keseluruhan, sinergi antar pemangku kepentingan di Aceh Selatan sudah berjalan baik, meskipun peningkatan kapasitas serta pemerataan edukasi kebencanaan di seluruh desa terdampak tetap diperlukan agar upaya mitigasi lebih optimal.

Kata Kunci : *Peran BPBD, Banjir, Mitigasi Bencana, Kabupaten Aceh Selatan*

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	13
1.3. Rumusan Masalah.....	13
1.4. Tujuan Penelitian	13
1.5. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1. Landasan Teori.....	15
2.1.1. Pengertian Peran.....	15
2.1.2. Konsep Penanggulangan Bencana Banjir	18
2.1.3. Bencana Banjir.....	20
2.2. Pembahasan Penelitian Yang Relevan	21
2.3. Penelitian Terdahulu.....	21
BAB III.....	28

METODE PENELITIAN	28
3.1. Pendekatan Penelitian.....	28
3.2. Lokasi Penelitian	29
3.3. Sumber Data	29
3.4. Informan Penelitian	30
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	32
BAB IV	34
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1. Profil Kabupaten Aceh Selatan.....	34
4.2. Profil BPBD Kabupaten Aceh Selatan	38
4.3. Peran BPBD Kabupaten Aceh Selatan.....	41
4.4. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung.....	58
4.4.1. Faktor Penghambat	59
4.4.2. Faktor Pendukung	59
BAB V.....	60
PENUTUP.....	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62

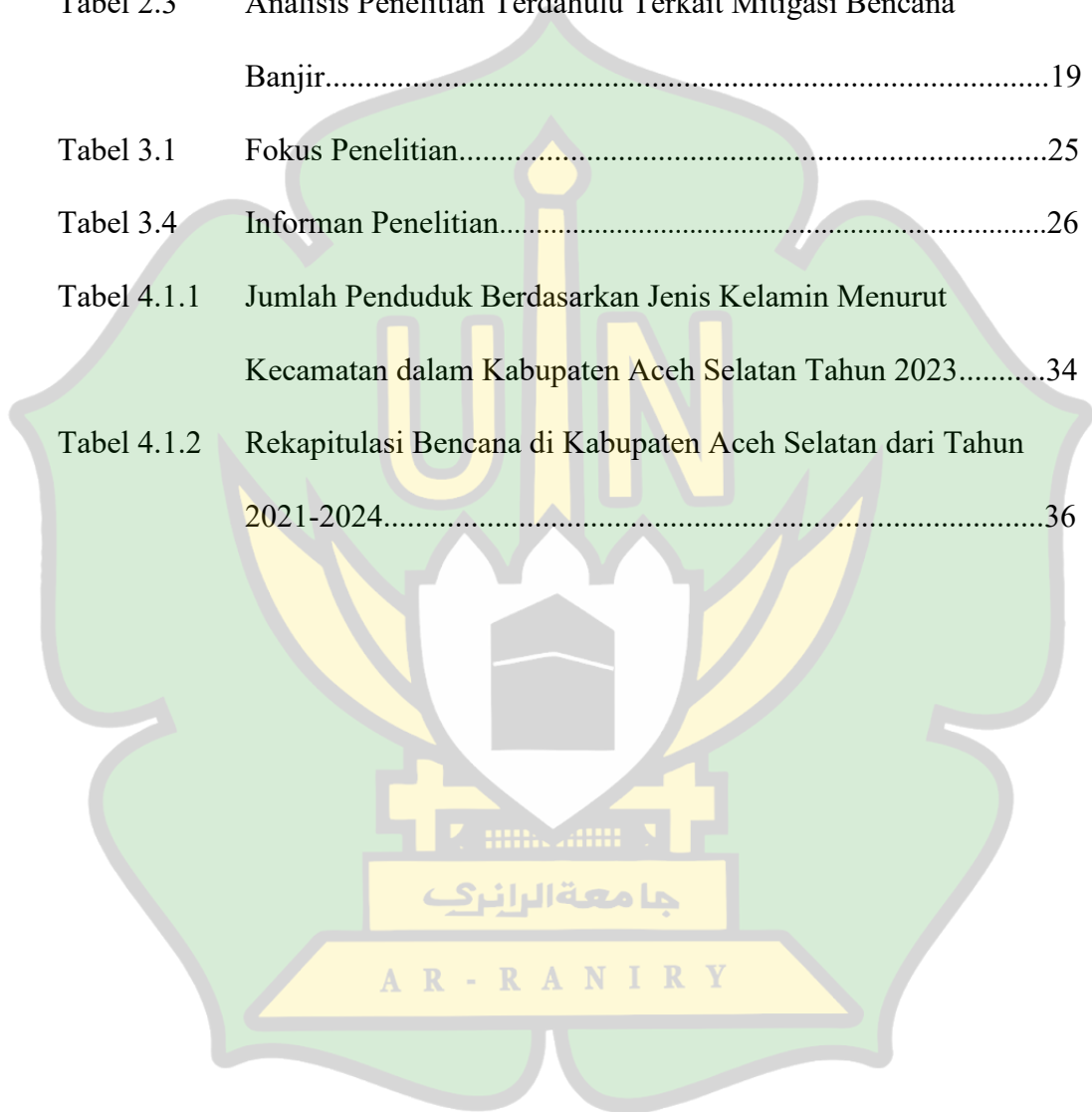
LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rekapitulasi Berita terkait Bencana Banjir di Kabupaten Aceh Selatan.....	5
Tabel 2.3	Analisis Penelitian Terdahulu Terkait Mitigasi Bencana Banjir.....	19
Tabel 3.1	Fokus Penelitian.....	25
Tabel 3.4	Informan Penelitian.....	26
Tabel 4.1.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023.....	34
Tabel 4.1.2	Rekapitulasi Bencana di Kabupaten Aceh Selatan dari Tahun 2021-2024.....	36



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Potensi Bencana Banjir Kabupaten Aceh Selatan.....	8
Gambar 4.1	Kondisi Banjir di Kabupaten Aceh Selatan 10 Maret Ketinggian 50 cm.....	35
Gambar 4.2	Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Aceh Selatan.....	39



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah skripsi yang berjudul “Peran Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten Aceh Selatan Dalam Mitigasi Bencana Banjir”. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada banyak kekurangan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, S.Ag. M.Ag., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Eka Januar, M.Soc, Sc., Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Muhammad Thalal, M.Si., M.Ed., Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Reza Idria, M.A., Ph.D., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

6. Muazzinah, B.Sc., MPA., Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Zakki Fuad Khalil, S.IP, M.Si. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A. Pembimbing I yang telah telah meluangkan pikiran dan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti.
9. Siti Nur Zalikha, M.Si., Pembimbing II yang telah meluangkan pikiran dan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti.
10. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan ilmu kepada peneliti selama menempuh pendidikan perkuliahan.

Banda Aceh, 21 Agustus 2025
Peneliti,

A R - R A N I R

FAKROL NIZAN
NIM. 200802039

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bencana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, diartikan sebagai suatu kejadian atau rangkaian peristiwa yang menimbulkan ancaman serta gangguan terhadap kelangsungan hidup dan penghidupan Masyarakat. Bencana ini bisa dipicu oleh faktor alam maupun non-alam, dan berpotensi menimbulkan kerugian, baik berupa kehilangan jiwa, kerusakan lingkungan, kerusakan materiil, hingga dampak psikologis yang signifikan.¹

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah mendirikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang berfungsi sebagai lembaga pelaksana sekaligus penyuluh dalam bidang penanggulangan bencana. Pembentukan lembaga ini didasari oleh Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, yang merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.² Berdasarkan Pasal 10 ayat (2), disebutkan bahwa BNPB adalah institusi Pemerintah non-kementerian yang berada di tingkat nasional, dan bertanggung jawab dalam mengoordinasikan serta melaksanakan penanggulangan bencana secara komprehensif. BNPB memiliki mandat untuk mengatur seluruh fase penanggulangan bencana, yang meliputi tahap sebelum bencana (prabencana), saat kejadian bencana (tanggap darurat), dan setelah bencana

¹ Undang-undang No 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1 ayat (1)

² Abu Azka Ibn Ibas, Bencana Alam dan Kesiapsiagaan Kita, (Quadra : Bandung, 2010), h.

(pascabencana).³ Peran BNPB meliputi fungsi koordinatif dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, baik sebagai pelaksana kegiatan penanggulangan maupun sebagai komando dalam pengendalian operasi penanggulangan bencana di seluruh wilayah Indonesia.⁴

Sementara itu, pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dilakukan oleh Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Di tingkat provinsi, BPBD dipimpin oleh seorang pejabat yang setara dengan pejabat di bawah gubernur atau memiliki jabatan setingkat IB. Sedangkan di tingkat kabupaten atau kota, BPBD dikepalai oleh pejabat yang berada satu tingkat di bawah Bupati/Wali Kota atau pejabat eselon IIA, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b UU No. 24 Tahun 2007. Pasal tersebut mengatur bahwa BPBD wajib dibentuk di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu kabupaten tertua di antara 23 kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Aceh. Wilayah ini terdiri dari 18 kecamatan dan mencakup 260 Gampong, dengan luas wilayah mencapai 4.173,82 kilometer persegi atau sekitar 417.382,50 hektare. Kondisi geografis Kabupaten Aceh Selatan yang terdiri dari wilayah pegunungan dan pesisir menjadikannya sebagai daerah yang rentan terhadap bencana alam. Dengan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menyadari pentingnya adanya organisasi khusus yang menangani bencana, agar upaya penanggulangan dapat dilaksanakan

³ Abu Azka Ibn Ibas, *Bencana Alam dan Kesiapsiagaan Kita*, (Quadra : Bandung, 2010), h.

⁴ Abu Azka Ibn Ibas, *Bencana Alam dan Kesiapsiagaan Kita*, (Quadra : Bandung, 2010), h.

secara menyeluruh, terkoordinasi, efektif, dan terencana. Berdasarkan kebutuhan tersebut, diterbitkanlah Qanun Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2014 yang mengatur struktur organisasi, tugas, fungsi, serta mekanisme kerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Selatan.⁵

BPBD Kabupaten Aceh Selatan memiliki kewenangan untuk merumuskan pedoman dan memberikan arahan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, yang meliputi kegiatan pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi yang adil dan merata. Selain itu, BPBD juga bertugas dalam menetapkan standar serta kebutuhan operasional penanggulangan bencana berdasarkan peraturan yang berlaku, serta menyusun dan menetapkan kebijakan teknis yang diperlukan.

BPBD bertugas untuk menginformasikan wilayah-wilayah yang memiliki potensi bencana, merancang dan menetapkan prosedur tetap dalam penanganan bencana, serta memberikan laporan pelaksanaan penanggulangan bencana kepada Bupati secara rutin setiap bulan dalam kondisi normal, dan sewaktu-waktu jika terjadi keadaan darurat. Selain itu, BPBD juga memiliki kewenangan dalam mengatur pengumpulan dan distribusi bantuan logistik, memastikan penggunaan anggaran dari APBD dapat dipertanggungjawabkan, serta menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Dalam menjalankan tugasnya, BPBD memiliki fungsi penting dalam menyusun serta menetapkan kebijakan terkait penanggulangan bencana dan

⁵ Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 38 tahun 2016 tentang kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Selatan

⁶ Ibid, Pasal 2 ayat (1)

penanganan pengungsi secara cepat, tepat, efisien, dan efektif. Lembaga ini juga bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan penanggulangan bencana agar pelaksanaannya dapat berjalan secara terstruktur, menyeluruh, dan terpadu. Tugas lainnya meliputi pembinaan teknis, pelaksanaan penanggulangan bencana, pelayanan administrasi, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam lingkup kebencanaan.⁷

Kabupaten Aceh Selatan, selain berada di dataran rendah, juga memiliki kontur wilayah yang tidak rata, terdiri atas perbukitan dan pegunungan dengan tingkat kemiringan yang tajam. Kondisi geografis ini menjadikannya sebagai daerah yang rawan terhadap bencana alam, khususnya banjir. Banjir merupakan jenis bencana alam yang cukup sering terjadi dan dapat menimbulkan kerusakan besar seperti rusaknya rumah warga, kawasan permukiman, infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Dampak dari bencana ini juga mengganggu transportasi publik serta menghambat aktivitas ekonomi Masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Namun demikian, implementasi dari peraturan tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan optimal sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penanganan bencana di daerah ini masih memerlukan peningkatan efektivitas dan koordinasi.

⁷ Ibid, pasal 3 ayat (2)

Penanganan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Selatan masih cenderung berfokus pada fase tanggap darurat, yaitu ketika bencana sudah terjadi. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala, seperti terbatasnya ketersediaan alat berat serta kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung. Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa perlu untuk mengangkat isu ini sebagai objek penelitian, khususnya dalam hal upaya penanganan bencana secara menyeluruh.

Alasan penulis memilih topik ini adalah karena penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Aceh Selatan tampak belum optimal pada tahap pencegahan atau mitigasi. Idealnya, BPBD secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat di desa-desa yang tergolong rawan bencana, minimal satu kali dalam sebulan. Hal ini penting agar Masyarakat memiliki pemahaman dan kesiapan dalam menghadapi potensi bencana yang mungkin terjadi.

**Tabel 1. 1 Rekapitulasi Berita terkait Bencana
Banjir Kabupaten Aceh Selatan**

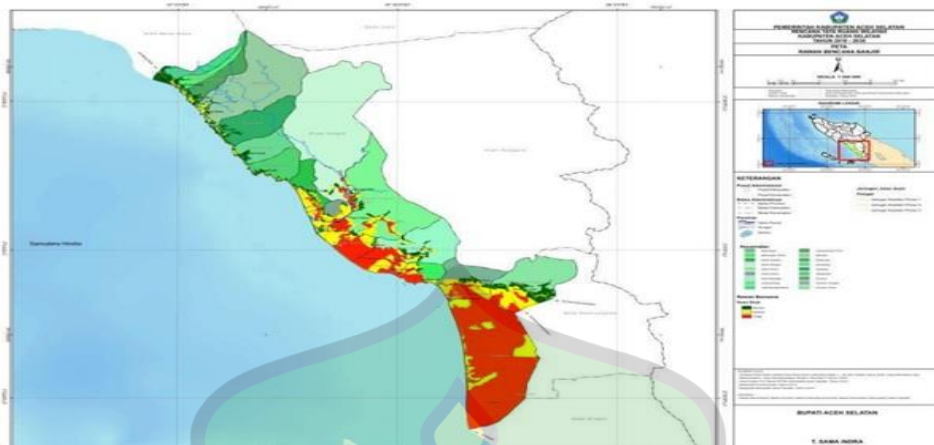
No.	Judul Berita	Sumber	Tanggal Publikasi
1.	Hujan dengan intensitas sedang yang berlangsung selama setengah jam memicu terjadinya genangan air di Dusun Sawang Bunga, Aceh Selatan. Penyebab utama yang diduga adalah tersumbatnya sistem drainase atau gorong-gorong di wilayah tersebut.	https://aceh.tribunnews.com/2022/01/10/hujan-setengah-jam-dusun-sawang-bunga-aceh-selatan-banjir-diduga-akibat-tersumbatnya-goronggorong	10 Januari 2022

No.	Judul Berita	Sumber	Tanggal Publikasi
2.	Momentum hari pertama Idulfitri di Kabupaten Aceh Selatan diwarnai dengan bencana banjir yang merendam tiga wilayah kecamatan sekaligus.	https://aceh.tribunnews.com/2022/05/03/hari-pertama-lebaran-tiga-kecamatan-di-aceh-selatan-terendam-banjir	3 Mei 2022
3.	Banjir di Aceh Selatan mengakibatkan genangan di beberapa ruas jalan nasional serta merendam rumah warga dan sekolah.	https://aceh.tribunnews.com/2022/07/29/sejumlah-ruas-jalan-nasional-di-aceh-selatan-tergenang-banjir-pemukiman-dan-sekolah-ikut-terendam	29 Juli 2022
4.	Sejumlah Gampong di wilayah Kecamatan Tapaktuan terdampak banjir akibat hujan lebat.	https://aceh.tribunnews.com/2022/09/01/hujan-deras-sejumlah-Gampong-di-kecamatan-tapaktuan-terendam-banjir	1 September 2022
5.	Selain banjir, hujan deras di Aceh Selatan juga memicu terjadinya longsor.	https://aceh.tribunnews.com/2022/09/01/tak-hanya-banjir-hujan-deras-di-aceh-selatan-juga-sebabkan-longsor	1 September 2022
6.	Air Sungai Samadua meluap sehingga beberapa Gampong terendam banjir.	https://aceh.tribunnews.com/2022/09/01/sungai-samadua-meluap-sejumlah-Gampong-tergenang-banjir	1 September 2022
7.	Melimpahnya air sungai menyebabkan warga yang terdampak banjir di Aceh Selatan dievakuasi.	https://aceh.tribunnews.com/2022/11/03/sungai-meluap-warga-terdampak-banjir-di-aceh-selatan-dievakiasi	3 November 2022
8.	Melimpahnya air Sungai Kluet setelah hujan deras di Aceh Selatan menyebabkan banjir mencapai ketinggian satu meter di enam	https://aceh.tribunnews.com/2023/05/07/hujan-deras-guyur-aceh-selatan-sungai-kluet-meluap-6-kecamatan-banjir-hingga-1-meter-ini-datanya	7 Mei 2023

No.	Judul Berita	Sumber	Tanggal Publikasi
	kecamatan; data terkait adalah sebagai berikut.		
9.	Aceh Selatan diguyur hujan deras, mengakibatkan banjir yang merendam tiga desa.	https://aceh.tribunnews.com/2023/09/20/hujan-lebat-guyur-aceh-selatan-tiga-desaterendam-banjir	20 September 2023
10.	Aceh Selatan mengalami banjir setelah diguyur hujan deras.	https://aceh.tribunnews.com/2023/11/20/breaking-news-diguyur-hujan-deras-aceh-selatan-dilanda-banjir	20 November 2023
11.	Akibat banjir, hasil panen sawit di Aceh Selatan tertunda untuk waktu yang lama.	https://aceh.tribunnews.com/2023/11/24/dampak-banjir-hasil-sawit-di-wilayah-aceh-selatan-lama-tidak-bisa-dipanen	24 November 2023
12.	Pasca banjir, Pemkab membuka fasilitas rumah sakit lapangan untuk penanganan bencana di Trumon Tengah.	https://aceh.tribunnews.com/2023/11/30/pasca-banjir-pemkab-buka-rumah-sakit-lapangan-darurat-bencana-di-trumon-tengah	30 November 2023

Sumber : Kanal Berita Online

Berdasarkan tabel di atas, Bencana yang sering terjadi di Kabupaten Aceh Selatan adalah Bencana Banjir dan Longsor. Dari Tabel di atas, sebagian besar berupa bencana banjir yang dipicu hujan deras, luapan sungai, serta buruknya sistem drainase. Bencana ini hampir terjadi setiap tahun bahkan berulang dalam satu tahun, dengan dampak yang meluas seperti merendam permukiman, sekolah, ruas jalan nasional, memaksa evakuasi warga, menimbulkan longsor pada 2022, hingga mengganggu sektor ekonomi Masyarakat seperti tertundanya panen sawit, sehingga pada 2023 Pemerintah daerah membuka rumah sakit lapangan darurat sebagai langkah penanganan.



Gambar 1.1 Peta Potensi Bencana Banjir Kabupaten Aceh Selatan

Sumber: Perkim Aceh Selatan

Gambar diatas bisa dilihat Sebagian Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan memiliki potensi bencana banjir. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Aceh Selatan juga telah menceritakan peta rawan bencana menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki potensi ancaman yang cukup beragam, mulai dari banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, abrasi, erosi, hingga angin kencang. Banjir menjadi ancaman paling dominan, terutama di daerah aliran sungai, muara, serta wilayah terdampak pasang laut, ditambah banjir kiriman dari Aceh Singkil dan Aceh Tenggara yang kerap melanda Kecamatan Trumon. Longsor tersebar dalam tiga kategori rendah, sedang, dan tinggi yang dipengaruhi kondisi perbukitan dan geologi, dengan mitigasi berupa bronjong, talud, saluran pembuangan, dan reboisasi. Selain itu, Aceh Selatan yang berada di jalur lempeng aktif rawan gempa tektonik sekaligus tsunami, sementara pesisir rentan abrasi dan wilayah bergelombang menghadapi erosi. Peta kerawanan ini menjadi dasar penting bagi Pemerintah daerah dalam merumuskan strategi mitigasi bencana.

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya sistematis untuk mengurangi risiko dan dampak bencana, baik melalui pembangunan fisik (seperti sumur resapan dan sistem peringatan dini) maupun melalui penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghadapi ancaman bencana. Tujuannya adalah meminimalisir kerugian, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat, serta menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan yang aman dan berkelanjutan.

Jenis-jenis Mitigasi Bencana Mitigasi bencana dapat dibagi menjadi dua jenis utama:

1. Mitigasi Struktural:

Upaya yang melibatkan pembangunan fisik dan infrastruktur untuk mengurangi dampak bencana. Contoh: Membangun bendungan, tanggul, rumah yang tahan gempa, atau sistem peringatan dini.

2. Mitigasi Non-struktural:

Upaya yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan kebijakan untuk mengurangi risiko bencana. Contoh: Sosialisasi, edukasi masyarakat tentang bencana, membuat peraturan daerah, penanaman pohon, serta meningkatkan kesadaran akan bahaya.

Tujuan Mitigasi Bencana

Mengurangi dampak dan kerugian akibat bencana, khususnya bagi penduduk.
Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai potensi risiko bencana di wilayah

mereka. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Memberikan dasar atau pedoman bagi pemerintah dalam merencanakan pembangunan yang mempertimbangkan risiko bencana.

Upaya Mitigasi yang Bisa Dilakukan

Pencegahan:

Melakukan analisis dan penilaian risiko bencana secara berkala.

Peringatan Dini:

Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem peringatan dini untuk bencana seperti banjir atau tsunami.

Penanganan Fisik:

Membangun infrastruktur yang kokoh dan ramah lingkungan, seperti penanaman pohon besar dan sumur resapan.

Penyadaran Masyarakat:

Melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai prosedur evakuasi, penanganan awal, dan tindakan pencegahan yang bisa dilakukan.

Perencanaan Pembangunan:

Mengintegrasikan pertimbangan risiko bencana dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan wilayah.

Kabupaten Aceh Selatan termasuk salah satu daerah di Provinsi Aceh yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana banjir. Menurut peta rawan bencana yang disusun oleh Bappeda bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), banjir tercatat sebagai bencana yang paling sering terjadi dibandingkan dengan bencana lain seperti tanah longsor, gempa bumi, abrasi pantai, maupun erosi. Tingginya potensi banjir ini erat kaitannya dengan kondisi geografis wilayah yang dilalui oleh sejumlah sungai besar, berada di sekitar muara, serta memiliki kawasan pesisir yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Selain faktor tersebut, banjir juga kerap diperparah oleh luapan air dari Kabupaten Aceh Singkil dan Aceh Tenggara yang hampir setiap tahun berdampak pada wilayah Kecamatan Trumon Timur, Trumon Tengah, serta Trumon.

Pemetaan risiko banjir di Kabupaten Aceh Selatan dilakukan melalui pendekatan tiga indikator utama, yaitu Indeks Bahaya, Indeks Kerentanan, serta Indeks Paparan, yang difokuskan pada kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kluet. Analisis tersebut menunjukkan bahwa wilayah ini terbagi ke dalam tiga tingkat kerawanan banjir. Kategori risiko rendah meliputi area seluas sekitar 1.392 km² dengan 24 kelurahan, sebagian besar berada di daerah dataran tinggi. Risiko sedang mencakup kurang lebih 1.401 km² dengan 16 gampong, sementara risiko tinggi menutupi wilayah sekitar 1.375 km² dengan jumlah kelurahan yang sama, yang umumnya terdapat di kawasan perkotaan dan permukiman padat. Peta kerawanan banjir ini berperan penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah, mulai dari perumusan strategi mitigasi, penyediaan infrastruktur

pengendalian banjir, hingga peningkatan kapasitas Masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Selatan memiliki kewajiban untuk menjalankan upaya mitigasi bencana sebagaimana diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 24 Tahun 2012. Upaya tersebut dilaksanakan melalui empat tahapan utama, yaitu: pra bencana, yang meliputi pemetaan kawasan rawan, kegiatan sosialisasi, sistem peringatan dini, dan pembangunan infrastruktur pengendali; kesiapsiagaan, berupa penyusunan rencana kontinjensi, pelaksanaan simulasi, serta pembinaan relawan; tanggap darurat, yang mencakup proses evakuasi korban, penyediaan lokasi pengungsian, distribusi bantuan logistik, serta perbaikan sarana vital secara cepat; dan pasca bencana, yang difokuskan pada rehabilitasi, rekonstruksi, pemulihan kondisi sosial-ekonomi, serta pembangunan kembali dengan pendekatan rehabilitasi dan rekonstruksi atau membangun lebih baik dari sebelumnya.

Pada penanggulangan bencana saat ini, aspek mitigasi yang seharusnya berperan penting dalam mengurangi risiko sebelum bencana terjadi sering kali kurang mendapat perhatian. Sebaliknya, penanganan bencana lebih terfokus pada tahap tanggap darurat serta pemulihan setelah bencana berlangsung.

Permasalahan yang sering terjadi dalam proses mitigasi bencana adalah belum maksimalnya pelaksanaan rencana penanggulangan bencana oleh Pemerintah di daerah rawan banjir. Hal ini terlihat dari masih adanya tanggul yang rusak namun belum diperbaiki, serta kurang optimalnya kegiatan penyuluhan mitigasi bencana bagi Masyarakat yang tinggal di kawasan rentan banjir. Dari latar

belakang di atas, peneliti tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR”**.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Bencana banjir rutin terjadi di Kabupaten Aceh Selatan setiap tahunnya.
2. BPBD Kabupaten Aceh Selatan jarang melakukan edukasi rutin di desa rawan bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan Masyarakat sebelum bencana terjadi.

1.3. Rumusan Masalah

1. Untuk mengetahui bagaimana peran BPBD Kabupaten Aceh Selatan dalam Mitigasi Bencana Banjir?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam mitigasi bencana banjir di Kabupaten Aceh Selatan?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran BPBD Kabupaten Aceh Selatan dalam melaksanakan upaya mitigasi bencana banjir.
2. untuk mengetahui hambatan yang dihadapi BPBD Kabupaten Aceh Selatan dalam upaya mitigasi bencana banjir.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi penting bagi semua pihak terkait. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai keterlibatan BPBD Kabupaten Aceh Selatan dalam mitigasi bencana banjir.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi penelitian selanjutnya, sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut.

2. Bagi Perguruan Tinggi

- a) Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan tentang keterlibatan BPBD Kabupaten Aceh Selatan dalam kegiatan mitigasi bencana banjir.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini bertujuan untuk membantu Pemerintah dalam menentukan peran BPBD Kabupaten Aceh Selatan dalam mitigasi bencana banjir.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi Masyarakat dan memberikan tambahan wawasan tentang peran BPBD Kabupaten Aceh Selatan dalam mitigasi bencana banjir.